

**KEBIJAKAN ALJAZAIR MENOLAK BERGABUNG DENGAN KOALISI
ANTI-TERORIS *ISLAMIC MILITARY COUNTER TERRORISM*
COALITION PADA TAHUN 2015**

**Oleh : Ulfah Fadhilah
Pembimbing : Ali Muhammad, S.IP., M.A., Ph.D.**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Terrorism issue is one of issue which always attentioned by entire world, because the issue related to security problem in every countries. IMCTC is one of military alliance was allied in Middle East with muslim majority countries which also fight the terrorism. But, Algeria is country which not join the alliance. Algeria has the factors that influence Algeria policy to not join the coalition.

Keywords : Terrorism, Middle East, Algeria, Military, Coalition.

A. Latar Belakang Masalah

Timur Tengah (termasuk wilayah Maghreb) adalah wilayah yang memiliki konflik yang kompleks, dimulai dari konflik internal negara yang disebabkan oleh perbedaan tafsir atau ideologi sudah menjadi hal yang lumrah menjadikan hal tersebut menyebabkan adanya perselisihan. Selain itu, faktor yang terjadi karena beberapa alasan seperti ketidakpuasan masyarakat dengan kepemimpinan yang telah diterapkan, seperti ekonomi yang memburuk ataupun sistem pemerintahan yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan pemerintah disalahkan oleh masyarakatnya. Kemudian munculah kelompok – kelompok yang memiliki visi untuk menggulingkan pemerintahnya tersebut dengan menggunakan kekerasan

seperti memberontak, merusak properti atau fasilitas umum serta memberikan dampak terhadap keamanan masyarakat dan negara.

Kelompok yang dimaksud adalah kelompok terorisme. Definisi tentang terorisme yang diberikan oleh Konvensi Arab untuk Penindasan Terorisme menyatakan bahwa terorisme adalah setiap tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif atau tujuannya, yang terjadi dalam kemajuan individu atau kolektif agenda kriminal dan berusaha untuk menabur kepanikan di antara orang-orang, menyebabkan rasa takut dengan melukai mereka, atau menempatkan hidup mereka, kebebasan atau keamanan dalam bahaya, berusaha untuk menyebabkan kerusakan pada lingkungan atau ke instalasi publik, swasta, properti atau untuk menduduki atau menyita mereka dan berusaha membahayakan sumber daya nasional (Jide Ibieta F. C., 2014).

Isu Terorisme menjadikan khususnya wilayah timur tengah sebagai pusat munculnya kelompok teroris, pada awalnya gerakan ini muncul karena adanya gerakan nasionalis tetapi semenjak terjadinya peristiwa serangan 11 September 2001, George Bush sebagai presiden Amerika pada periode saat itu menyatakan bahwa "Perang Melawan Teror" adalah salah satu prioritas Amerika Serikat. "Perang" ini berlanjut untuk akhirnya mengubah sifat kebijakan nasional dan internasional mereka. Serangan yang dilakukan sudah diakui oleh kelompok Al Qaeda yang menjadi pelaku penyerangan tersebut (Jide Ibieta P. F., 2014). Peristiwa ini memperlihatkan bahwa misi kelompok ini tidak sebatas untuk kepentingan di wilayah nasional tetapi sudah meluas, yaitu memiliki misi untuk bergerak ke ranah internasional.

Al-Qa'ida atau Maghrib Islam (AQIM) adalah salah satu cabang terorisme yang berada di Aljazair, kelompok ini secara resmi lahir pada Januari 2007 ketika Kelompok Salafis Aljazair untuk Berkhotbah dan Memerangi (*GSPC / Groupe Salafiste pour la Predication et le Combat*) yang bergabung menjadi al-Qa'ida di Afrika Utara. Al-Qaida kemudian memperluas jaringannya ke arah Barat yaitu negara-negara Eropa, terutama Prancis dan Spanyol. Selain itu, sebelum AQIM menghantam jantung pusat ibu kota Aljazair pada 11 April 2007, tiga serangan bunuh diri serentak menghantam istana pemerintah dan dua pos keamanan. Serangan ini dirayakan oleh al-Qa'ida sebagai *Badr of Maghrib*, adapun serangan teror di Riyadh pada November 2003 (Filiu, 2009).

Karena isu terorisme sangat penting maka masyarakat internasional berinisiatif dengan membentuk organisasi internasional untuk melawan isu terorisme atau keamanan negara, seperti OIC (*The Organisation of Islamic Cooperation*), PBB, OAU (*The Organisation of African Unity*). Kemudian pada tahun 2015 muncul aliansi baru yang di gagas oleh Arab Saudi yaitu IMCTC (*Islamic Military Counter Terrorism Coalition*), tujuan dari pembentukan aliansi tidak lain untuk mengintensifkan upaya dalam memerangi terorisme melalui kerjasama dengan pusat operasi gabungan yang berbasis di Riyadh untuk mengkoordinasikan dan mendukung operasi militer. Jumlah negara yang bergabung sejauh ini adalah 41 negara yang berasal dari negara Timur Tengah, Afrika dan Asia (The Royal Embassy of Saudi Arabia in Roma, 2017) .

Selain Indonesia dan Iraq, negara Aljazair adalah salah satu negara yang memilih untuk tidak ikut bergabung dengan aliansi yang di bentuk oleh arab sudi,

padahal tujuan aliansi dibentuk untuk memberantas teroris di wilayah negara – negara Islam dan Aljazair termasuk negara yang memiliki konflik yang disebabkan oleh kelompok – kelompok yang mengklaim *Djihadists* atau teroris.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri dengan menggunakan Model Aktor Rasional oleh Graham T. Allison. Untuk memahami teori Kebijakan Luar Negeri dan proses pembuatan sebuah kebijakan luar negeri maka perlu ada pemahaman terkait pengertiannya, pengertian Kebijakan Luar Negeri yang di kemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton adalah :

“ Foreign policy is a strategy or planned course or action developed by the decision makers of state and vis a vis other states or international entities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest. A specific foreign policy carried on by a state may be the result of an initiative by that state or may be a reaction to initiative undertaken by other states ”
(Olton, 1969) .

Pengertian yang dimaksud bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi atau program yang direncanakan ataupun strategi yang dikembangkan oleh pengambil keputusan suatu negara untuk menghadapi negara lain serta untuk entitas internasional yang bertujuan mencapai tujuan spesifik dan didefinisikan dalam hal kepentingan nasional dan adanya kebijakan luar negeri tidak lain memiliki tujuan untuk mencapai suatu kepentingan nasional.

Model Aktor Rasional merupakan bagian atau instrumen dari *Rational Choice* (pilihan rasional), negara adalah aktor utama dalam pengambilan keputusan. Kepentingan nasional dan keamanan nasional adalah salah satu faktor dipertimbangkannya keputusan kebijakan luar negeri. Seperti yang dijelaskan oleh Graham T. Allison dibawah ini :

“ Politik Luar Negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan – tindakan aktor rasional untuk mencapai suatu tujuan. Dalam model aktor rasional pembuatan keputusan digambarkan sebagai suatu proses intelektual, dimana pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah, dalam politik luar negerinya harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif yang mengarah ke kebijaksanaan yang bisa diambil pemerintah, dengan perhitungan untung rugi atas alternative itu perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi ” (Mas'ood, 1994).

Model aktor rasional ini membuat pemerintah memilih tindakan yang akan memaksimalkan tujuan dan sasaran strategi. Adapun konsep pengorganisasian agar penyusunan teori ini lebih jelas dan terstruktur, yaitu :

- a. *National Actor*, disini aktor rasionalnya adalah pemerintah atau bangsa yang dianggap sebagai pengambil keputusan yang rasional, aktor ini memiliki satu set tujuan yang sebelumnya telah ditentukan serta memiliki konsekuensi yang lebih sedikit dari pilihan – pilihan yang ada.
- b. *The Problem*, adanya masalah menggerakkan suatu negara untuk membuat pilihan yang strategis bagi kebaikan negaranya.

- c. *Static Selection*, suatu kegiatan yang relevan dengan suatu masalah merupakan apa yang telah dipilih oleh negara sebagai solusi. Dengan demikian tindakan tersebut dipahami sebagai pilihan yang terbaik dari pilihan – pilihan yang lainnya.
- d. *Action as Rational Choice*, tindakan atau keputusan adalah pilihan yang rasional. Komponen – komponen dari tindakan rasional ada 4, yaitu sasaran dan tujuan, opsi, konsekuensi dan pilihan.

Model aktor rasional ini memiliki sifat stokastik atau peluang, ketika negara memutuskan pilihan atau kebijakannya maka ini akan menjadi suatu peluang yang mungkin menurut negaranya suatu pilihan tersebut akan menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya (Allison, *Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis*, 2001, hal. 694).

C. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yaitu kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan ranah jangkauan yang luas. Penulis lebih spesifik menggunakan metode pengumpulan data dan informasi mengenai topik pembahasan penulisan yang diperoleh dengan menggunakan teknik data sekunder yaitu dengan mencari melalui buku dan media massa seperti internet (jurnal, artikel, surat kabar harian nasional, internasional) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Hasil Penelitian

Negara Aljazair adalah salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Utara berbatasan dengan laut Mediterania, antara Maroko dan Tunisia dan termasuk

wilayah kawasan Timur Tengah Maghreb. Sistem pemerintahannya yaitu Republik – Presidensial dan ibukotanya terletak di di Aljir, kemudian sistem legalnya mengambil dari hukum perdata Perancis dan hukum Islam. Presiden yang sedang menjabat adalah Abdelaziz Bouteflika, menjabat semenjak 28 April 1999 sampai sekarang dan perdana menteri adalah Ahmed Ouyahia menjabat semenjak 16 August 2017 – sekarang (Central Intelligent Agency, 2018)

Negara Aljazair ini adalah negara yang memiliki konflik yang cukup banyak, terutama dengan keamanan negaranya, karena kelompok – kelompok pemberontak banyak yang muncul dari negara tersebut, seperti FIS (*Islamic Salvation Front*), GSPC (*Salafist Group for Preaching and Combat*), kemudian GSPC ini pada 11 september 2006 mengklaim bahwa kelompok ini adalah Al Qaeda maghreb (Mohammed Sergie contributed to the report, 2015).

1. Aljazair Fokus terhadap Perbaikan Internal dan Keamanan Negara

Arab Saudi dan Qatar adalah salah satu anggota dari aliansi IMCTC yang meminta negara Aljazair untuk bergabung dengan aliansinya. Tetapi Aljazair memutuskan untuk menolak bergabung dengan aliansi anti teroris tersebut. Melihat bahwa potensi militer aljazair adalah yang terbesar di wilayah Afrika akan membantu aliansi untuk melawan terorisme khususnya di wilayah Afrika.

IMCTC memiliki visi yang seharusnya memberikan keuntungan yang besar bagi Aljazair apabila bergabung, karena ini adalah salah satu pemicu keeksistensian Aljazair di ranah internasional, agar citra bahwa negara ini adalah negara yang memiliki militer cukup kuat di wilayah Afrika dan dapat membantu menyelesaikan

konflik di ranah internasional apalagi konflik ini terjadi di wilayah negara – negara Islam (Dunia Islam).

Pada dasarnya bergabung dengan IMCTC adalah salah satu keuntungan bagi negara yang bergabung dengan aliansi tersebut, yaitu (The Islamic Military Counter Terrorism Coalition, 2017) :

1. Memperkuat kontribusi negara-negara Islam terhadap keamanan dan perdamaian global, dan melengkapi upaya penanggulangan terorisme internasional.

Salah satunya yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam memperkuat hubungan mereka yaitu, Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional telah menegaskan solidaritas penuh UEA dengan Arab Saudi atas pemilihan Senat Arab Saudi pada tahun 2018 ini. Kementrian UEA juga memberikan dukungan yang tegas untuk Arab Saudi dalam upayanya untuk menghadapi ekstremisme dan terorisme, serta menekankan pentingnya tindakan internasional untuk memproposikan perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia (Gulf News, 2018). Adanya hubungan negara yang baik akan menggerakkan dan maksimalkan visi atau operasi dalam menangani masalah yang di tuju oleh aliansi IMCTC.

2. Memperkuat solidaritas dan kolaborasi di antara negara-negara anggota koalisi untuk menghadirkan front persatuan melawan organisasi-organisasi teroris dan upaya mereka untuk mengganggu stabilitas keamanan dan mengubah citra Islam dan Muslim.

3. Menentang ideologi radikal di negara-negara anggota Koalisi melalui kampanye komunikasi strategis untuk membantah narasi dan propaganda radikal dan ekstremis.
4. Menegaskan kembali nilai-nilai moderat Islam dan prinsip-prinsip perdamaian, toleransi dan belas kasihnya.
5. Memerangi pendanaan terorisme bekerja sama dengan negara-negara anggota Koalisi dan otoritas KKP internasional, untuk mempromosikan kepatuhan terhadap perjanjian internasional dan memajukan kerangka kerja hukum, peraturan, dan operasional.
6. Membangun kemitraan strategis antara negara-negara anggota, negara-negara pendukung dan organisasi internasional untuk berbagi informasi dan keahlian anti terorisme.

Poin – poin diatas adalah salah satu visi yang sama bagi Aljazair, yaitu memiliki cita – cita dalam perdamaian. Tetapi Aljazair memutuskan untuk menolak karena memiliki rasionalitas yang lebih menguntungkan bagi negaranya untuk mencapai kepentingan nasional dan keamanan negaranya.

a. Kekuatan Militer Aljazair

Dalam melawan terorisme di dalam negara Aljazair sendiri memiliki pengalaman dalam taktik kontra-terorisme karena mereka telah memerangi ancaman jihadis sejak awal 1990-an. Pada tahun 2011, militer Aljazair menggunakan dua cabang atau strategi dalam melawan teroris yaitu menyerang tempat persembunyian di timur laut negaranya dengan pemboman udara dan operasi dipermukaan, kemudian negara ini berusaha untuk memotong koneksi para teroris dari sebagian kelompok mereka yang berada di selatan yang menjadi sumber

atas dana dan materialnya. Operasi ini berhasil telah menelan korban 250 orang anggota AQIM selama tahun 2007 sampai 2010 data ini di kutip dari (Gaub, Algeria's army: on jihadist alert , 2015, hal. 3).

Pada tahun 2018 Aljazair ada di urutan ke 23 dari 136 negara dalam *Global Firepower review* melihat dari *Power Index* nya 0.4296. Keterangannya bahwa skor yang lebih rendah adalah yang terbaik di indeks GFP (GFP - World Military Strength, 2018). Pemerintah Aljazair meningkatkan anggaran pertahanannya mencapai \$10 miliar pada tahun 2017, mewakili 6,24 persen dari PDB dan meningkat 176 persen sejak 2004. Pada tahun 2017, menurut SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*) importir senjata utama di benua Afrika dengan 46 persen dari semua impor ke wilayah tersebut (Ghanem-Yazbeck, *The Algerian Army : Cooperation, Not Intervention*, 2017).

| No. | Nama jenis kekuatan | Total kekuatan |
|-----|----------------------------------|----------------|
| 1 | Total personil militer | 792,350 orang |
| 2 | Total <i>Aircraft Strength</i> | 528 |
| 3 | Total <i>Helicopter Strength</i> | 280 |
| 4 | <i>Combat Tanks</i> | 2,405 |
| 5 | <i>Armored Fighting Vehicles</i> | 6.754 |

Gambar 1 Table 1 Indeks Kekuatan Militer Aljazair
(GFP - World Military Strength, 2018)

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa negara Aljazair adalah salah satu negara yang memiliki pasukan keamanan yang memiliki kinerja terbaik di benua Afrika. Negara

ini berpengalaman dalam operasi kontra – terorisme dan kontra – pemberontakan juga telah berjuang dalam menghadapi jaringan jihad selama dekade terakhir.

Kemudian dengan Aljazair memiliki kekuatan militer yang cukup kuat di Afrika, memiliki kepercayaan bagi negara regional lainnya untuk bekerjasama dengan negara ini. Aljazair dan Tunisia kini memiliki hubungan bilateral, Komisi Gabungan Tinggi Aljazair – Tunisia ke 21 menyatakan dalam sebuah pers bahwa kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat baik disemua bidang, terutama di bidang ekonomi dan keamanan (Middle East Observer, 2017).

b. Peran Militer dalam Politik

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Carnegie Middle East Center (Ghanem, 2018), bahwa militer adalah pemegang utama kekuatan nasional. Kemudian peran tentara di negara ini adalah berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan Aljazair atau disebut dengan para *Décideurs* dalam bahasa Prancis yaitu sebagian terdiri dari anggota senior Tentara Nasional Rakyat (PNA), partai – partai politik memiliki hubungan dekat dengan militer, seperti Front Pembebasan Nasional (FLN) dan Reli Nasional untuk Demokrasi (RND) serta elit politik dan ekonomi berpengaruh lainnya. Sistem demokrasi memang ada tetapi terbatas, karena para pembuat keputusan telah memberikan warga kebebasan terbatas.

c. Adanya Ketegangan Etnis

Bentrokan etnis terjadi antara Berber Mozabite (Bani Mzab) dan Arab Chaamba di provinsi Ghardaia, 600 km selatan Aljir. Bentrokan ini terjadi dimulai pada dua tahun yang lalu yaitu pada tahun 2013, menewaskan lebih dari 20 orang

dan melukai 300 orang. Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika memberikan perintah atau keputusan untuk mengirim pasukan militer ke Ghardaia. Ghardaia sudah menjadi rumah bagi dua komunitas etnis yang berbagi sejarah panjang persaingan atas kepemilikan tanah, properti dan perumahan. *Mozabber Berber* adalah *Ibadis*, mengikuti bentuk Islam yang berbeda dari Sunni dan Syiah, sementara *Chaamba Arab*, awalnya *Bedouins*, mempraktikkan pendekatan Maliki ke Islam (Benlakehal, 2015).

Konflik ini terjadi sudah sejak lama yaitu pada tahun 1975, penyebab konflik ini lebih ke politik, sosial dan ekonomi. Adanya pengangguran di wilayah ini dan mayoritas kaum muda tidak memiliki prospek pekerjaan di masa depan. Tetapi pada dasarnya, kedua komunitas tidak saling percaya, dan masing-masing merasa dipinggirkan oleh yang lain. Orang Berber menuduh orang Arab mendapat manfaat dari perlakuan istimewa oleh pemerintah, termasuk memperoleh pekerjaan dan tempat tinggal yang lebih baik, karena mereka orang Arab. Sementara itu, orang-orang Arab menuduh Berber, yang umumnya dianggap lebih kaya, menghalangi integrasi orang Arab yang lebih miskin ke dalam struktur sosial eksklusif mereka.

d. Ketidakpuasan Masyarakat Aljazair

Aljazair memiliki peran aktif dalam membantu menyelesaikan konflik di negara – negara tetangga, karena melihat dari kemampuan Aljazair yang dapat menjadi penengah konflik antara negara di regional, seperti peran aktif Aljazair di Mali dan Libya. Adanya peran Aljazair di ranah regional dan internasional menyebabkan kerentanan prospek ekonomi dan keamanan domestiknya. Kemudian adanya pengiriman militer atau kekuatan militer dan pengaruh politiknya untuk

mendorong stabilitas regional dan mengoordinasikan upaya regional untuk memerangi kelompok-kelompok teroris. Hal tersebut dapat menyebabkan protes dari masyarakat di Aljazair Utara karena kurangnya pemberian layanan publik dan marginalisasi daerah pedesaan (Carboni, 2015).

e. Keputusan Aljazair Menolak bergabung dengan IMCTC

Telah dijelaskan bahwa kekuatan dan peran militer Aljazair sangat berpengaruh dalam perkembangan negaranya, baik di ranah internal maupun eksternal. Adanya militer Aljazair seharusnya akan memperkuat negara dari konflik yang disebabkan oleh kelompok – kelompok teroris.

Negara Aljazair tidak ingin melibatkan tentaranya diluar regionalnya, hal ini memiliki alasan bahwa negara Aljazair sudah berkomitmen dan melindungi tentara militernya dari peristiwa konflik di luar negara dan luar regionalnya. Ini adalah salah satu keuntungan bagi Aljazair karena ketika tentara yang telah dilatih dengan profesional kemudian tentara ini dikerahkan untuk berfokus di dalam negaranya, maka biaya atau dana peralatan militer tidak akan membludak dan menjadikan negara Aljazair harus membeli peralatan tentara militernya ke negara lain seperti, Amerika Serikat, Prancis dan Jerman.

Menurut (Stratfor : WORLDVIEW, 2015) empat masa jabatan presiden Bouteflika telah membentuk Aljazair menjadi negara yang stabil yang diperintah oleh kepemimpinan sipil yang kuat. Pemimpin Aljazair berikutnya akan menjadi figur yang lebih netral yang akan memenuhi persyaratan elit politik, ekonomi dan militer negara itu. Bouteflika akan memastikan keunggulan pasukan keamanan dalam memerangi kelompok-kelompok militan, melindungi pendapatan

hidrokarbon negara itu dan mempertahankan jaringan patronase Aljazair yang luas ((BTI) B. S., 2016)

Presiden Bouteflika ini sudah lima periode dalam masa jabatannya semenjak tahun 1999 sampai sekarang 2018. Salah satu program yang difokuskan terhadap negara Aljazair adalah adanya pemulihan perdamaian dan keamanan untuk pembangunan yang berkelanjutan di negara tersebut. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga adalah satu program yang difokuskan, melihat dari sejarah yang kelam karena telah terjadi perang saudara di negara ini. Maka ini adalah visi utama yang harus diperhatikan (Tlemçani, 2018).

Hal tersebut adalah salah satu fokus utama Aljazair dalam menangani teroris, salah satu keuntungan bagi Aljazair apabila menolak bergabung selain karena merasa negara ini masih mampu melawan teroris dengan kekuatan militer yang dimiliki yang memang tidak terlepas dari bantuan Amerika Serikat. Akan lebih menguntungkan apabila mengedepankan atau memfokuskan perbaikan negaranya daripada ikut bergabung dengan IMCTC, yang memang pada dasarnya memiliki visi yang sama untuk melawan terorisme.

2. Aljazair adalah Negara non – Blok yang berupaya menghindari Konflik Intervensi Negara Luar

Upaya dalam memerangi terorisme salah satunya menggunakan kekuatan tentara militer, baik itu di dalam negara ataupun diluar negaranya, sebagai upaya membantu melawan terorisme di wilayah lain, bisa di ranah regional ataupun di ranah non regional. Seperti yang dilakukan Aljazair sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh bagi perdamaian di wilayah Afrika. Dalam sejarahnya, pasukan

keamanan Aljazair berhasil menghancurkan pemberontakan selama satu dekade dan dalam meningkatnya kestabilan regional, Amerika dan Eropa menganggap Aljazair sebagai mitra keamanan yang berpotensi di wilayah Maghreb dan Sahel (Francis Ghilès, *Updating Algeria's Military Doctrine*, 2017).

Pada tahun 1970 – 1980 an adalah tahun yang menjadikan Aljazair memiliki peran di ranah internasional, salah satunya pada tahun 1974 Aljazair membantu mengusir rezim *Apartheid* di Afrika Selatan dari Majelis Umum PBB (UNGA). Abdelaziz Bouteflika sebagai Menteri Luar Negeri Aljazair menjadi Majelis Umum, pada saat itu untuk mendukung adanya gerakan anti – *Apartheid*. Bouteflika berpendapat bahwa delegasi yang dikeluarkan oleh Afrika Selatan tidak sah karena mereka hanya mewakili dari kulit putih (The New York Times, 1981). Kontribusi ini dikenal sebagai “keputusan Bouteflika” (Embassy of People's Democratic Republic of Algeria in Pretoria, t.thn.).

Adanya aliansi IMCTC, mengeluarkan kebijakan untuk ikut berkontribusi dalam melawan terorisme di negara anggota khususnya dan umumnya di negara Muslim atau yang bermayoritas Muslim. Adanya campur tangan pihak dari anggota IMCTC ini yang membuat negara Aljazair menolak bergabung. Adapun melihat dari Kebijakan Luar Negeri yang dimiliki oleh negara Aljazair.

Semenjak kemerdekaan Aljazair pada tahun 1962, negara ini telah mengadopsi Kebijakan Luar Negeri berdasarkan prinsip yang diterapkan oleh revolusi Aljazair. Prinsip – prinsip ini adalah yang pertama mendukung hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri tanpa adanya campur tangan dalam urusan internal negara dan penyelesaian konflik secara damai. Prinsip – prinsip ini dirumuskan

dalam kerangka program Tripoli pada Juni 1962 yang diusulkan setelah kemerdekaan oleh Dewan Revolusi Nasional, yang mengabdikan komitmen negara Aljazair terhadap kebijakan luar negeri untuk perjuangan melawan imperialisme dan dukungan gerakan pembebasan di dunia. Berkenaan dengan prinsip hak rakyat atas penentuan nasib sendiri, revolusi Aljazair berkontribusi pada pengadopsian resolusi PBB 1514 tentang hak rakyat atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan pada 14 Desember 1960.

Adanya konstitusi 1976 yang berisi bahwa tidak ada intervensi militer di luar perbatasan negara Aljazair, Pasal 90 dari konstitusi 1976 menyatakan "Sesuai dengan prinsip dan tujuan Gerakan Non-Blok, Aljazair akan berjuang untuk perdamaian, hidup berdampingan secara damai, dan tidak campur tangan dalam urusan internal negara." (Democratic Arabic Center , 2017).

Adapun intervensi militer yang pernah dilakukan oleh Aljazair adalah tentara Aljazair membantu melindungi Sahara Barat yang melarikan diri dari memajukan pasukan Maroko di Sahara Barat pada musim dingin 1975-1976 (Democratic Arabic Center , 2017). Tetapi, untuk mengimbangi batas – batas non – intervensi, Aljazair memiliki alternatif lain, negara ini telah memperkuat kerjasama dengan negara tetangga atau negara yang berasal di wilayah regionalnya seperti Mali, Libya, Nigeria dan terutama Tunisia.

Faktor lain yang membuat Aljazair memutuskan untuk tidak bergabung dengan Aljazair adalah menghindari adanya upaya intervensi negara Aljazair ke negara lain diluar regionalnya ini akan memberikan pengaruh terhadap pengeluaran militer ataupun adanya penugasan tentara militer di luar regionalnya, karena negara

Aljazair tidak ingin tentara militernya ikut turun dalam menyelesaikan atau melawan teroris diluar wilayahnya. Selain itu, keuntungan yang mungkin didapat adalah meminimalisasi adanya intervensi ke negara Aljazair dengan alasan adanya konflik internal atau perang saudara yang tidak dapat diselesaikan oleh Aljazair.

E. Kesimpulan

Isu terorisme adalah isu yang selalu menjadi perhatian bagi masyarakat global, pengertian terorisme selalu diidentikan dengan kekerasan yang memiliki motif atau tujuan kepentingan politik, agama maupun ideologi. Adanya kepentingan tersebut menjadi penyebab dari adanya konflik kemudian memberontak menjadi kelompok radikal, yaitu sering disebut dengan teroris. Akibat yang dirasakan oleh korban adalah bisa kematian, luka, memberikan kepanikan dan ketakutan. Adanya kerusakan properti dan layanan publik ini selalu ada akibat serangan teroris di negara yang menjadi targetnya. Kelompok yang terkenal dengan serangan ekstrem salah satunya adalah Al Qaeda.

Adanya konflik atau perang saudara di beberapa negara di wilayah Timur Tengah menjadikan Arab Saudi menginisiasi sebuah aliansi militer yaitu *Islamic Military Counter Terrorism Coalition (IMCTC)*. Aliansi ini akan berfokus terhadap perlawanan bagi teroris di wilayah Timur Tengah maupun di negara anggota kemudian mengintensifkan upaya memerangi terorisme melalui kerja bersama.

Tetapi Aljazair adalah salah satu negara yang memutuskan untuk menolak bergabung. Memang dengan adanya aliansi IMCTC akan membantu dan menguntungkan dalam melawan teroris, karena adanya persatuan atau penggabungan kekuatan militer terhadap perlawanan bagi terorisme di wilayah

Timur Tengah dan sekitarnya. Tetapi bagi Aljazair akan lebih menguntungkan ketika tidak ikut bergabung karena negara ini akan lebih berfokus terhadap visi dalam memperbaiki internal negara dalam menciptakan perdamaian dan keamanan nasionalnya.

Kemudian alasan yang lain juga, bahwa meminimalisasi adanya intervensi ke negara Aljazair yang disebabkan oleh adanya konflik internal yang membutuhkan campur tangan dari pihak ke tiga.

DAFTAR PUSTAKA

- (BTI), B. S. (2016). Algeria Country Report. *Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (BTI)*, 15.
- Allison, G. T. (2001). Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis . *American Political Science Association*, 694.
- Benlakehal, M. (2015, Juli 20). *Renewed tensions grip Algeria's Ghardaia*. Retrieved from Aljazeera News: <https://www.aljazeera.com/news/2015/07/renewed-tensions-grip-algeria-ghardaia-150720085201955.html>
- Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (BTI) . (2016). Rule of Law. *Algeria Country Report*, 10.
- Carboni, A. (2015, November). *ALGERIA REAL-TIME ANALYSIS OF AFRICAN POLITICAL VIOLENCE, NOVEMBER 2015*. Retrieved from ACLED : Armed Conflict Location and Event Data Project: https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2015/11/ACLED_Conflict-Trends-Report-No.43-November-2015_pdf.pdf
- Central Intelligent Agency. (2018, Desember 18). *The World Factbook*. Retrieved from Central Intelligent Agency: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html>
- Democratic Arabic Center . (2017, Februari 22). *Kebijakan luar negeri Aljazair di Afrika: perkembangan dan penentu*. Retrieved from Pusat Demokrasi Arab : dalam bahasa Arab: <https://democraticac.de/?p=43847>
- Embassy of People's Democratic Republic of Algeria in Pretoria. (n.d.). *Brief overview of the relations between Algeria and South Africa*. Retrieved from Embassy of People's Democratic Republic of Algeria in Pretoria: <http://www.embassyofalgeria-rsa.org/index.php/en-gb/algeria-south-africa-relations/overview>
- Filiu, J.-P. (2009). The Local and Global Jihad of al-Qa'ida in the Islamic Maghrib. *The Middle East Journal*, 213.
- Francis Ghilès, A. K. (2017, Juni 06). *Updating Algeria's Military Doctrine*. Retrieved from Middle East Institute: <https://www.mei.edu/publications/updating-algerias-military-doctrine>
- Gaub, F. (2015). Algeria's army: on jihadist alert . *Brief Issue*, 3.
- GFP - World Military Strength. (2018). *2018 Military Strength Ranking*. Retrieved from GFP - World Military Strength: <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp>
- GFP - World Military Strength. (2018). *Algeria Military Strength*. Retrieved from GFP - World Military Strength: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=algeria
- Ghanem, D. (2018). *Limiting Change Through Change: The Key to the Algerian Regime's Longevity*. Carnegie Middle East Center.

- Ghanem-Yazbeck, D. (2017, Desember 07). The Algerian Army : Cooperation, Not Intervention. *Istituto Per Gli Studi Di Politica Internazionale (ISPI)*. Retrieved from Istituto Per Gli Studi Di Politica Internazionale (ISPI): <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/algerian-army-cooperation-not-intervention-19132>
- Gulf News. (2018, Desember 18). *UAE voices solidarity with Riyadh on US Senate vote*. Retrieved from Gulf News: <https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/saudi-arabia-condemns-us-senate-votes-on-yemen-khashoggi-1.1545006738819>
- Jide Ibietan, F. C. (2014). Concept of Terrorism. *International Terrorism and the Middle East : An Expository Approach* , 69.
- Jide Ibietan, P. F. (2014). Concept of Terrorism. *International Terrorism and the Middle East : An Expository Approach* , 68.
- Mas'oe'd, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metologi*. Jakarta: LP3ES.
- Middle East Observer. (2017, Maret 11). *Algeria, Tunisia will enjoy stability and security whatever the price: Algerian PM*. Retrieved from Middle East Observer: <https://www.middleeastobserver.org/2017/03/11/32840algeria-tunisia-will-enjoy-stability-and-security-whatever-the-price-algerian-pm/>
- Mohammed Sergie contributed to the report. (2015, March 27). *Al-Qaeda in the Islamic Maghreb*. Retrieved from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/background/al-qaeda-islamic-maghreb>
- Olton, J. C. (1969). International Relation Dictionary. In R. a. Wingston, *International Relation Dictionary* (p. 127). USA.
- Stratfor : WORLDVIEW. (2015, Desember 29). *Algeria's President Crafts a Succession Plan*. Retrieved from Stratfor : WORLDVIEW: <https://worldview.stratfor.com/article/algerias-president-crafts-succession-plan>
- The Islamic Military Counter Terrorism Coalition. (2017). *IMCTC Strategic Objectives* . Retrieved from The Islamic Military Counter Terrorism Coalition: <https://imctc.org/English/About>
- The New York Times. (1981, Maret 03). *Archive ; South Africa is Again Denied a Seat by General Assembly*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/1981/03/03/world/south-africa-is-again-denied-a-seat-by-general-assembly.html>
- The Royal Embassy of Saudi Arabia in Roma. (2017). Brief History of IMCTC. *Focus on : Islamic Military Counter Terrorism Coalition*, 02 - 03.
- Tlemçani, R. (2018). Algeria Under Bouteflika Civil Strife and National Reconciliation . *Carnegie Endowment*, 8-10.